

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara yang kaya akan keberagaman politik, ekonomi, sosial, dan budaya, merupakan negara kesatuan berbentuk republik. Dengan sekitar 17.000 pulau dan 514 kabupaten dan kota, Indonesia memiliki tantangan dalam mengelola keberagaman ekonomi dan perekonomian di setiap daerah. Untuk mengatasi perbedaan ini, diperlukan sistem pembangunan daerah yang efektif.

Dalam upaya mencapai efektivitas tersebut, pemerintah memberlakukan sistem otonomi pada pemerintah daerah. Tujuannya adalah agar setiap daerah dapat mengelola urusan rumah tangganya sendiri dan tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat, terutama dalam kebijakan dan masalah keuangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mencari, mengelola, dan menggunakan sumber keuangan secara efisien.

Penerapan otonomi daerah merupakan salah satu metode untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Secara tidak langsung, pemerintah daerah diharapkan dapat mandiri dalam mengelola wilayahnya. Ketika otonomi daerah diterapkan, setiap daerah menunjukkan tingkat kesiapan yang berbeda dalam pengelolaan daerahnya. Beberapa daerah termasuk yang diuntungkan karena memiliki potensi penerimaan daerah yang tinggi, baik dari pajak daerah, retribusi daerah, maupun sumber daya alam yang mencukupi untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan. Namun, di sisi lain, bagi beberapa

daerah, otonomi daerah dapat menimbulkan berbagai masalah karena adanya tekanan untuk meningkatkan tingkat kemandirian daerah.

Sejak diberlakukan otonomi daerah, setiap wilayah berupaya mencari sumber pendapatan untuk kas daerahnya. Salah satu sumber pendapatan tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber PAD lainnya yang sah, sebagaimana diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 pasal 6. Meskipun demikian, prinsip kebijakan perimbangan keuangan dalam UU No. 33 Tahun 2004 pasal 2 menjelaskan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai hasil pembagian tugas antara keduanya. Pemerintah pusat juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan fiskal di daerah, sehingga memberikan Dana Perimbangan.

Semakin tinggi pendapatan asli daerah yang diperoleh, maka tingkat kemandirian daerah tersebut juga akan semakin meningkat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD.

Salah satu indikator yang penting untuk diketahui pada suatu wilayah adalah laju pertumbuhan ekonomi (LPE). Indikator ini memperlihatkan bagaimana perekonomian suatu wilayah tumbuh membesar dari sisi volume barang dan jasa yang di hasilkan. Laju pertumbuhan ekonomi juga dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Laju pertumbuhan ekonomi

berhubungan erat dengan kegiatan ekonomi masyarakat, guna meningkatkan produksi barang dan jasa, sehingga dapat dijadikan sebagai indikator umum yang berguna dalam mengukur kemajuan atau penambahan perekonomian sebuah negara atau wilayah (Sirait, 2019).

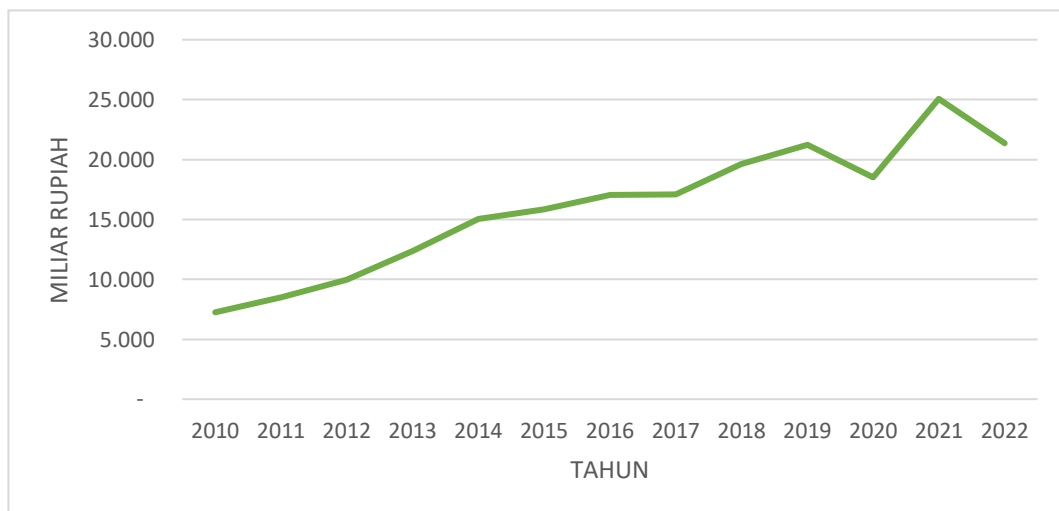
Selain itu, menurut Rosyidi (2002:87) dalam penelitian Batik (2018) pengaruh jumlah penduduk terhadap PAD jumlah serta mutu penduduk suatu daerah merupakan unsur penentu yang paling penting bagi kemampuan memproduksi serta standar hidup suatu negara atau daerah. Namun demikian, yang paling utama mengapa masalah penduduk ini sangat menarik perhatian para pakar ekonomi adalah karena penduduk itu merupakan sumber tenaga kerja, human resource, disamping sumber faktor produksi skill

Jumlah penduduk merupakan faktor yang sangat penting sebagai wajib pajak, karena pajak adalah gejala sosial artinya pajak hanya terdapat di dalam masyarakat. Jika tidak ada masyarakat berarti tidak ada pajak, sebab pajak dipungut untuk kepentingan masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu, hubungan antara pajak dan masyarakat erat sekali. Pajak-pajak di dalam masyarakat dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi.

Setiap daerah memiliki pemerintahnya sendiri yang diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri, menciptakan sistem desentralisasi. Sejak lahirnya amandemen UUD 1945 dan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pemilihan kepala daerah mulai dilakukan secara langsung. Sebelum adanya undang-undang tersebut,

pemilihan kepala daerah masih dilakukan melalui perwakilan di DPRD. Pemilihan umum kepala daerah di Indonesia dilaksanakan untuk setiap 5 (lima) tahun sekali.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sejak tahun 2011, ekonomi Jawa Barat menunjukkan tren pertumbuhan. Salah satu indikatornya tercermin dari PAD provinsi di Tanah Pasundan tersebut yang terus menerus naik dari 7,2 miliar rupiah pada tahun 2010 menjadi 21,5 miliar rupiah pada tahun 2022.



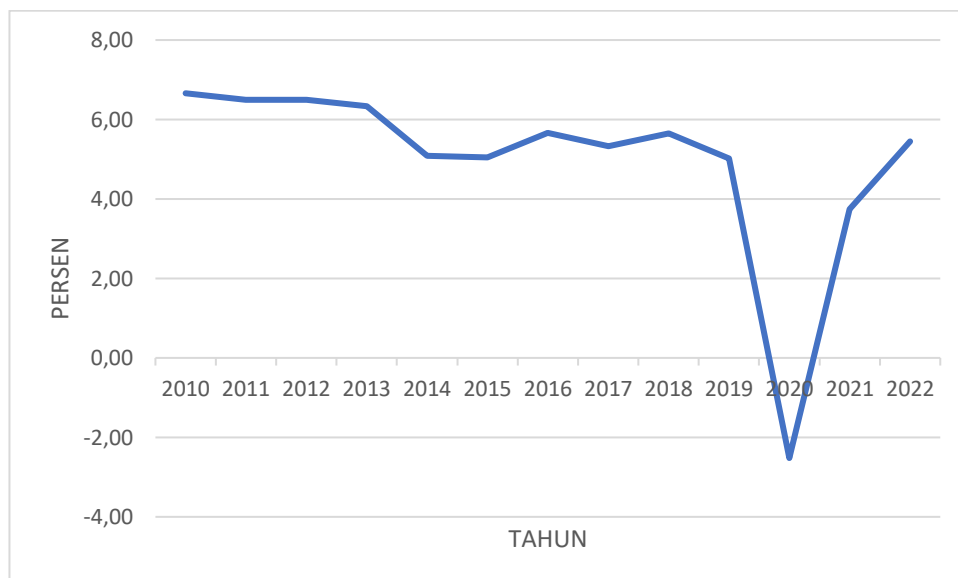
Gambar 1. 1 Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Berdasarkan pada gambar 1.1, tingkat pendapatan asli daerah di Jawa Barat sejak tahun 2010 sampai tahun 2019 terus mengalami peningkatan, tetapi pada tahun selanjutnya pendapatan asli daerah Jawa Barat mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2020-2022. Pada tahun 2020, pendapatan asli daerah provinsi Jawa Barat menerima pendapatan sebesar 18 miliar rupiah, turun sebesar 2,7 miliar rupiah yang tadinya pada tahun 2019 yaitu sebesar 21,2 miliar rupiah.

Hal tersebut disebabkan karena terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan dari banyak aspek salah satunya yaitu pendapatan asli daerah. Selain itu juga, pandemi ini memberikan dampak juga pada turunnya pajak daerah,

Pada tahun 2021 mengalami kenaikan lagi sebesar 6,5 miliar rupiah menjadi 25 miliar rupiah, tetapi pada tahun selanjutnya yaitu 2022 mengalami penurunan sebesar 3,7 rupiah yaitu menjadi 21,3 miliar rupiah.

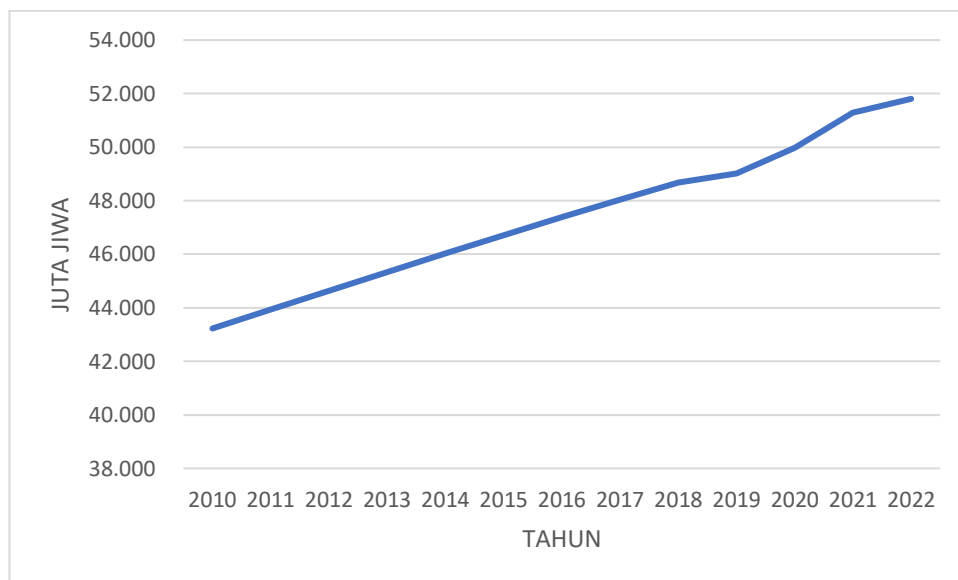


Gambar 1. 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Berdasarkan gambar 1.2, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010 laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sebesar 6,66 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2011 menjadi sebesar 6,50 persen. Pada tahun 2013 dan tahun 2014 juga mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2013 laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sebesar 6,33 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2014 yaitu 5,09 persen. Setelah itu, laju

pertumbuhan ekonomi juga mengalami fluktuasi pada tahun 2016 dan 2017, pada tahun 2016 yaitu sebesar 5,66 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 5,33 persen. Terus mengalami fluktuasi lagi pada tahun 2018 dan 2019, pada tahun 2018, yaitu sebesar 5,65 persen, mengalami penurunan menjadi 5,02 persen, lalu pada tahun 2020 mengalami penurunan lagi menjadi -2,52 persen.



Gambar 1. 3 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Jumlah penduduk selalu mengalami kenaikan di setiap tahunnya, pada tahun 2010 jumlah penduduk Jawa Barat yaitu 43,2 juta jiwa terus naik sampai pada tahun 2022 menjadi 51,8 juta jiwa, tentu saja ini adalah suatu hal yang bagus karena, jumlah penduduk sangat berpengaruh dalam menentukan besarnya produksi suatu daerah karena ada masyarakat atau penduduk maka akan ada potensi penerimaan daerah, karena masyarakat merupakan objek pajak juga sebagai wajib pajak dan retribusi, dimana sumber penerimaan pajak dan retribusi itu berasal dari masyarakat

atau penduduk. Oleh karena itu agar penerimaan daerah semakin naik, maka harus diikuti dengan pertumbuhan penduduk.

Dalam setiap penyelenggaraan pemilukada secara serentak dibutuhkan anggaran yang sangat besar. Pelaksanaan pemilukada tahun 2015 biaya yang dibutuhkan mencapai 7 triliun rupiah lebih yang diikuti oleh 269 daerah. Sedangkan pada pemilukada serentak kedua pada tahun 2017 yang diikuti oleh 101 daerah mengalami penurunan menjadi 5,9 triliun rupiah. Untuk pemilukada serentak pada tahun 2018 sendiri yang diikuti 171 daerah mengalami kenaikan yang sangat besar dari pemilukada sebelumnya, anggaran untuk pemilukada tahun 2018 sendiri tercatat menelan biaya hingga 15,15 triliun rupiah (www.dpr.go.id). Selain itu, adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada masa akhir jabatan kepala daerah atau pada saat menjelang pemilukada, hal tersebut sudah menjadi fenomena yang wajar terjadi di Indonesia (Ritonga 2010).

Dari fenomena yang telah dijelaskan maka penelitian ini akan menganalisis mengenai topik tersebut yaitu dengan judul “Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, dan Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010-2022”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka rumusan identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaruh laju pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan pemilihan kepala daerah secara parsial terhadap pendapatan daerah tahun 2010-2022?
2. Bagaimana pengaruh laju pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan pemilihan kepala daerah secara simultan terhadap pendapatan daerah tahun 2010-2022?
3. Bagaimana elastisitas pendapatan asli daerah terhadap laju pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk dan pemilihan kepala daerah di provinsi Jawa Barat tahun 2010-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh laju pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan pemilihan kepala daerah secara parsial terhadap pendapatan daerah tahun 2010-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh laju pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan pemilihan kepala daerah secara simultan terhadap pendapatan daerah tahun 2010-2022.
3. Untuk mengetahui elastisitas pendapatan asli daerah terhadap laju pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk dan pemilihan kepala daerah di provinsi Jawa Barat tahun 2010-2022.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka kegunaan penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Kegunaan teoritis bagi penulis, dengan penelitian ini sebagai salah satu tugas akhir yaitu skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan Sarjana Ekonomi, selain itu harapan penulis yaitu penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman penulis mengenai dinamika dan faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat, khususnya mengenai pengaruh laju pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan pemilihan kepala daerah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi almamater, penelitian ini dapat menambah referensi yang ada dan bisa digunakan oleh semua pihak yang membutuhkan, dan juga penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terutama dalam ilmu ekonomi.
2. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi tambahan bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian dengan topik serta permasalahan yang sama ataupun ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.
3. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam masalah pendapatan asli daerah, dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan terkait pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui pendapatan asli daerah.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Tasikmalaya dan data yang di peroleh untuk menunjang penelitian ini yaitu dari website Badan Pusat Statistik (BPS)

1.5.2 Waktu Penelitian

Tabel 1. 1 Waktu Penelitian

Keterangan	Tahun 2023												Tahun 2024																											
	Oktober				November				Desember				Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli									
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Pengajuan Judul																																								
Acc Judul Penelitian																																								
Pembuatan Usulan Penelitian Bab I s.d III																																								
Seminar Usulan Penelitian																																								
Revisi Usulan Penelitian																																								
Pengolahan Data dan Penyusunan Bab IV s.d V																																								
Sidang Skripsi																																								